



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



PUSAT INVESTASI
PEMERINTAH

RENCANA STRATEGIS BISNIS PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

TAHUN 2025 - 2029



JL. GGSJ RATULANGI NO. 17
JAKARTA PUSAT - 10350

LEMBAR PENGESAHAN PEJABAT PENGELOLA

**RENCANA STRATEGIS BISNIS
BADAN LAYANAN UMUM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2025 - 2029**

Jakarta,

Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah

Selaku Pimpinan BLU,



Ismed Saputra

NIP 197105131996031001

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS

**RENCANA STRATEGIS BISNIS
BADAN LAYANAN UMUM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2025-2029**

Jakarta,

Mengetahui

DEWAN PENGAWAS BLU

Ketua merangkap Anggota

Astera Primanto Bhakti

Anggota,

Anggota,

Ririn Kadariyah

Yulius

Anggota,

Anggota,

Elan Satriawan

Putut Hari Satyaka

LEMBAR PENETAPAN MENTERI KEUANGAN

**RENCANA STRATEGIS BISNIS
BADAN LAYANAN UMUM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2025-2029**

Jakarta,

An. Menteri Keuangan

Sekretaris Jenderal,

**Heru Pambudi
NIP 197002111989121001**

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEJABAT PENGELOLA	2
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS	3
LEMBAR PENETAPAN MENTERI KEUANGAN.....	4
DAFTAR ISI	5
KATA PENGANTAR.....	6
RINGKASAN EKSEKUTIF	7
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL	9
1.2. Visi & Misi BLU PIP	10
1.3. TARGET RENCANA STRATEGIS BISNIS	11
BAB II ANALISIS DAN STRATEGI	13
2.1. EVALUASI KINERJA BLU PIP	13
2.2. ANALISIS SWOT	14
2.3. INISIATIF STRATEGIS	18
BAB III RENCANA STRATEGIS BISNIS.....	21
3.1. KEBIJAKAN RPJMN TAHUN 2025-2029	21
3.2. STRATEGI BISNIS BLU.....	21
3.3. KEGIATAN DAN INDIKATOR	23
BAB IV PENUTUP	27
4.1 KESIMPULAN	27
4.2 HAL-HAL PENTING	28

KATA PENGANTAR

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Pusat Investasi Pemerintah, maka fokus utama kegiatan BLU Pusat Investasi Pemerintah adalah dalam rangka mewujudkan visi Pusat Investasi Pemerintah "Menjadi Pengelola Pembiayaan UMKM yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Dalam rangka pencapaian visi, misi dan mendukung perencanaan lima tahunan Tahun Anggaran 2025-2029, Pusat Investasi Pemerintah menyusun Rencana Strategis dan Bisnis (RSB). RSB ini disusun dengan mengacu rencana strategis Kementerian Negara/Lembaga dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan yang terjadi, baik secara internal maupun eksternal.

Secara khusus, RSB Tahun Anggaran 2025-2029 ini disusun dengan memperhatikan kebijakan ekonomi pemerintah. Dalam hal ini, pembiayaan UMKM sebagai salah satu instrumen fiskal diharapkan dapat membantu UMKM agar dapat tumbuh dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan disusunnya RSB Pusat Investasi Pemerintah Tahun Anggaran 2025-2029 ini, diharapkan dapat menjadi pendorong dan pengarah gerak bagi semua komponen Pusat Investasi Pemerintah untuk meningkatkan kinerja secara profesional sehingga tujuan dan fungsi Pusat Investasi Pemerintah dapat diwujudkan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip *good governance*.

Jakarta,

Direktur Utama

Selaku Pimpinan BLU Pusat
Investasi Pemerintah



Ismed Saputra

Ringkasan Eksekutif

Kontribusi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional sangatlah besar. Namun demikian, masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Salah satu permasalahan krusial adalah sulitnya mendapatkan akses pembiayaan atau permodalan. Ekosistem Pembiayaan UMKM saat ini masih menghadapi tantangan sekaligus peluang. Untuk tantangan UMKM masih terdapat 29,2 Juta pelaku usaha yang belum terlayani pembiayaan sesuai dengan BPS dan Susenas 2021 sedangkan Pembiayaan UMI mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 masih memiliki keterbatasan, karena hanya melayani segmen usaha Ultra Mikro dengan plafon maksimal Rp. 20 Juta per debitur dengan skema eksekuting melalui penyalur (LKBB). Untuk menjawab tantangan tersebut PIP memiliki keunggulan komparatif untuk mengorkestrasi *fiscal tools* pada kementerian/lembaga, pemda, BUMN/D, dan instansi lain untuk mendukung penyediaan pembiayaan UMKM yang inklusif dilengkapi dengan pemberdayaan berkelanjutan. Mencermati dinamika tersebut, dengan terbitnya PMK Pembiayaan UMKM di tahun 2024 yang bertujuan untuk menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat dengan lending rate yang terjangkau, khususnya bagi UMKM yang belum terlayani secara formal, dilengkapi pemberdayaan yang berkualitas serta mentransformasi BLU PIP yang semula sebagai *coordinated fund* pembiayaan UMI untuk menjadi Pengelola UMKM yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai satuan kerja yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, BLU PIP memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan dana. Dengan kewenangan fleksibilitas tersebut, BLU PIP diharapkan dapat me-leverage dana yang dikelola agar dapat mencapai sasaran dan tujuan program pembiayaan UMKM. BLU PIP diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Bisnis yang bertujuan untuk memberikan petunjuk dan gambaran dari suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan.

Dalam upaya merumuskan Rencana Bisnis periode lima tahun (2025-2029), dilakukan analisis kondisi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan serta kesempatan dan ancaman melalui analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Melalui perhitungan matriks IFAS dan EFAS, diperoleh hasil Selisih Kekuatan dan Kelemahan sebesar 0,41 dan Selisih Peluang dan Ancaman sebesar 0,13. Hal ini apabila digambarkan dalam kuadran SWOT akan masuk dalam Kuadran I, sehingga strategi yang direkomendasikan adalah dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang sangat besar.

Dalam melaksanakan mandat yang diberikan, BLU PIP menetapkan visi "Menjadi Pengelola Pembiayaan UMKM yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Arah kebijakan BLU PIP pada tahun 2025-2029, pembiayaan tetap diprioritaskan ke segmen Umi (Ultra Mikro) dan pembiayaan diposisikan bersifat *complimentary* terhadap program eksisting serta dampak pembiayaan dan pemberdayaan diukur pada aspek ekonomi (usaha) dan non ekonomi (pelaku usaha).

Strategi BLU PIP dalam pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) yaitu pertama; membangun dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh stakeholder: K/L, Pemda, BUMN/BUMD, BUMDes, dll, termasuk dengan AFPI untuk berbagi pakai data pembiayaan untuk memperkuat database credit scoring serta kerjasama BPS untuk pensasaran target melalui survey. Kedua; Mengidentifikasi dan menggandeng mitra penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan *close loop ecosystem*, Perguruan Tinggi, Mahasiswa, siswa SMU, serta Jaringan PT Pos Indonesia. Ketiga; Menambah Dana Kelolaan dari semula Rp.10 T menjadi Rp. 13,7 T, dan Keempat; memperkuat kapasitas kelembagaan PIP baik dari segi organisasi, kerangka regulasi-proses bisnis, mitigasi risiko, SDM, IT dan Sarana Prasarana.

Kegiatan untuk peningkatan jumlah koperasi sebagai linkage penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi), perluasan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dengan melibatkan pembiayaan berbasis syariah, kerja sama pendanaan dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, penguatan kelembagaan penyalur melalui pelatihan pendampingan oleh penyalur dan penguatan kapasitas SDM penyalur dalam rangka menyongsong Industri 4.0, leveraging asset, pengembangan Sistem Informasi Kredit Program (*New Generation SIKP*) UMi berbasis *toll data*, Penguatan Instansi Vertikal DJPb sebagai fungsi Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Pembiayaan UMi, dan Pelatihan Kewirausahaan Umi akan tetap dilakukan dan ditingkatkan pada tahun 2025 -2029.

Dari aspek kinerja organisasi, BLU PIP menyusun rencana kerja yang diukur menggunakan metode *balance scorecard* dan sebagai operator pembiayaan, BLU PIP beroperasi dalam kegiatan usaha yang mengandung risiko. Seiring dengan risiko yang dihadapi semakin kompleks dan meningkatnya kebutuhan praktik tata kelola yang baik, serta dalam rangka meminimalisasi kerugian maka BLU PIP menerapkan manajemen risiko.

BAB I Pendahuluan

1.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Visi Presiden "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita sebagai Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

- Asta Cita 1 (Prioritas Nasional 1), Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
- Asta Cita 2 (Prioritas Nasional 2), Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- Asta Cita 3 (Prioritas Nasional 3), Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan ekonomi kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- Asta Cita 4 (Prioritas Nasional 4), Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran serta perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- Asta Cita 5 (Prioritas Nasional 5), Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- Asta Cita 6 (Prioritas Nasional 6), Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- Asta Cita 7 (Prioritas Nasional 7), Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
- Asta Cita 8 (Prioritas Nasional 8), Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk pencapaian sasaraannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang

memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta).

Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional.

Dalam Prioritas Nasional 3, Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Guna mendukung pencapaian dimaksud, diperlukan adanya strategi/kontribusi dalam Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif dan Kementerian Keuangan berkontribusi pada Program Pembangunan Peningkatan Produktifitas UMKM dan Koperasi yang dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.

1.2. Visi & Misi BLU PIP

BLU PIP yang dibentuk melalui PMK 91/PMK.05/2017 diberikan mandat oleh pemerintah sebagai operator investasi langsung pemerintah pada usaha ultra mikro melalui penyaluran pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sampai dengan 2024, pelaksanaan mandat masih terbatas dalam bentuk program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Keputusan Menteri Keuangan No.162/KMK.05/2022 Tentang Penetapan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah sebagai Operator Investasi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 163/KMK.05/2022 Tentang Kebijakan Investasi Pemerintah untuk Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah Selaku Operator Investasi Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan mandat tersebut dan mencapai tujuan organisasi, PIP menyusun dan menetapkan visi dan misi yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan inisiatif strategis, program kerja dan kegiatan.

Visi didefinisikan sebagai suatu gambaran yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Visi BLU PIP adalah **"Menjadi Pengelola Pembiayaan UMKM yang Inklusif dan Berkelanjutan"**.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan sebelumnya. Misi BLU PIP adalah:

- 1) Menyediakan layanan pembiayaan yang mudah dan terjangkau dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab;

- 2) Mengoptimalkan pengelolaan dana pembiayaan UMKM yang prudent, efisien dan efektif;
- 3) Mengembangkan teknologi informasi pendukung pembiayaan yang andal dan modern;
- 4) Melakukan pemberdayaan yang terstruktur dan berkelanjutan kepada pelaku UMKM;
- 5) Mengembangkan kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder untuk memperkuat ekosistem UMKM.

1.3. Target Rencana Strategis Bisnis

Seiring dengan kemajuan komitmen mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), target rencana strategis bisnis PIP dirancang berdasarkan tujuan-tujuan inti yang selaras dengan visi misi PIP untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan meningkatkan efektivitas operasional, meliputi:

- 1) Menyediakan layanan pembiayaan yang mudah dan terjangkau dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab
 - a. Penambahan Jumlah Penyalur;
 - b. Penambahan Plafon Pembiayaan Penyalur Eksisting (*top up*);
 - c. Pembangunan *innovative credit scoring*;
 - d. Penguatan *Pre-Post-Maintenance*;
 - e. Pengembangan Skema *On-Lending Windows* (OLW)
- 2) Mengoptimalkan pengelolaan dana pembiayaan UMKM yang prudent, efisien dan efektif
 - a. Penguatan Pengelolaan Fidusia;
 - b. Penguatan Pengelolaan Jaminan Tambahan;
 - c. Optimalisasi *Settlement*
 - d. Perluasan program segmen sasaran pembiayaan
- 3) Mengembangkan teknologi informasi pendukung pembiayaan yang andal dan modern
 - a. Integrasi dengan *Payment Gateway*
 - b. *Realtime* movev debitur
- 4) Pemberdayaan kepada pelaku UMKM
 - a. Perluasan kerjasama dengan Pemda/Pihak Lain
 - b. Penguatan pendampingan oleh Penyalur
 - c. Penguatan program pemberdayaan oleh PIP
- 5) Kolaborasi dan Sinergi
 - a. Perluasan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait
 - b. Integrasi/Berbagi Pakai Data Penyaluran Pembiayaan dalam

- c. Penguatan instansi vertikal DJPb sebagai fungsi monitoring penyaluran pembiayaan UMI/UMKM
- d. Peningkatan kolaborasi unit eselon I di lingkup Kemenkeu dalam rangka penguatan ekosistem UMKM

Selain target rencana strategis PIP, dalam rangka percepatan penyaluran kredit UMKM kepada masyarakat, terdapat kebijakan tarif layanan 0% kepada penyalur. Kebijakan ini bukan hanya sekedar memberikan kemudahan bagi penyalur, tetapi lebih ditujukan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dengan memfasilitasi akses keuangan yang lebih cepat dan lebih luas.

Selanjutnya, untuk memperkuat kerjasama dan memastikan keberlanjutan usaha, adanya implementasi tarif layanan dalam rentang yang variatif, di mana setiap tarif harus diklasifikasikan berdasarkan volume dan kualitas penyaluran yang berhasil dicapai. Klasifikasi ini dimaksudkan sebagai stimulasi, mendorong penyalur untuk terus meningkatkan kinerja dalam penyaluran kredit, sekaligus memastikan bahwa kebijakan tarif layanan PIP tetap adil dan memberikan manfaat yang berimbang kepada penyalur.

BAB II Analisis dan Strategi

2.1. Evaluasi Kinerja BLU PIP

Evaluasi Kinerja BLU PIP atas capaian Rencana Strategis dan Bisnis Tahun 2020-2024 tertuang dalam data sebagai berikut :

Kegiatan	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024 *)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penyaluran Pembiayaan ke Debitur UMi	Debitur	2,1 juta	3,44 juta	3 juta	5,39 juta	4,1 juta	7,40 juta	5,4 juta	9,62 juta	6,9 juta	11,83 juta
Peningkatan Jumlah LKBB/Koperasi/Lembaga Keuangan Mikro sebagai penyalur dan linkage	Penyalur/linkage	90	46	70	55	75	65	100	89	125	109
Perluasan Penyaluran pembiayaan ke debitur UMi berbasis Syariah	Rupiah	Rp10 Miliar	Rp 1.507 Miliar	Rp30 Miliar	Rp 1.294 Miliar	Rp50 Miliar	Rp2.598,54 Miliar	Rp70 Miliar	Rp3.482,28 Miliar	Rp3.500 Miliar	Rp3.221,38 Miliar
Pelaksanaan Kerjasama Pendanaan dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain	PKS	5	6	7	10	10	12	12	12	15	22
Pelaksanaan Pelatihan Manajerial dan Account Officer	Orang	115	229	130	383	150	326	175	319	350	389
Leveraging Aset	Rupiah	Rp50 Miliar	N/A	Rp100 Miliar	N/A	Rp150 Miliar	N/A	Rp200 Miliar	N/A	Rp250 Miliar	N/A
Penguatan Instansi Vertikal DJPb sebagai Fungsi Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Pembiayaan UMi	Pegawai	212	424	212	212	212	-	212	-	212	-
Pengembangan SIKP	Host to host	100%	19%	100%	40%	100%	100% (3 Modul)	100%	100% (1 Modul)	100%	100%
Pelatihan Kewirausahaan UMi	Debitur	600	650	700	820	800	913	900	900	1.420	2.979

*) per 31 Desember 2024

Penjelasan:

- 1) Target Peningkatan Jumlah LKBB/Koperasi/Lembaga Keuangan Mikro sebagai penyalur dan linkage tidak tercapai sebesar target yang tercantum dalam RSB 2020-2024 yaitu sebanyak 125 penyalur disebabkan beberapa hal antara lain:
 - a. Penambahan penyalur linkage melalui PT. BAV mengalami stagnasi sedangkan perubahan peraturan yang memungkinkan PIP untuk bekerjasama dengan LKBB non afiliasi pemerintah sebagai penyalur langsung baru terbit pada Desember 2020 dan efektif bisa dilaksanakan pada awal tahun 2021.
 - b. Kondisi pandemi COVID mulai awal tahun 2020 menyebabkan LKBB banyak yang mengalami penurunan kinerja secara signifikan sehingga tidak banyak LKBB yang memenuhi syarat NPL maks 5%. Selain itu kondisi COVID dan pasca COVID membuat LKBB memilih untuk memaksimalkan sumber dana yang sudah dimiliki mengingat permintaan pembiayaan masih belum normal.
 - c. Proyeksi penambahan penyalur dari Bumdes masih terkendala oleh kebijakan dan tata kelola Bumdes. Berdasarkan konsultasi dengan Kemendes PDTT, disepakati bahwa Bumdes yang dinilai aman untuk bekerjasama dengan PIP adalah Bumdes yang memiliki unit usaha LKM dan sudah berizin OJK. Pilihan tersebut sangat membatasi jumlah Bumdes yang bisa bekerjasama dengan PIP. Sampai dengan akhir semester I tahun 2024, baru terdapat 1 LKM milik

Bumdes yang berhasil menjadi mitra penyalur Pembiayaan UMi yaitu LKM Genthia Persada (unit usaha Bumdes Tibubeneng, Kab. Badung, Prov. Bali).

- 2) Target Penguatan Instansi Vertikal DJPb sebagai Fungsi Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Pembiayaan UMi mengalami penyesuaian pada RBA sehingga mulai tahun 2022 tidak menjadi target yang dicantumkan pada RBA. Hal tersebut mempertimbangkan bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan yang secara rutin telah dilaksanakan dan masih dilaksanakan sampai dengan tahun 2023. Selanjutnya monev keekonomian debitur akan dilaksanakan oleh PIP sehingga tidak lagi diperlukan pelatihan bagi personal Kanwil dan KPPN.

2.2. Analisis SWOT

Dalam upaya merumuskan Rencana Strategis Bisnis periode lima tahun (2025-2029), dilakukan analisis melalui SWOT. Hasil analisis tersebut akan dijadikan acuan dalam penentuan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan di masa yang akan datang.

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu perencanaan. Keempat faktor itulah yang membentuk istilah SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats). Proses ini melibatkan pemangku kepentingan masing-masing sektor dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matriks SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (strengths) mampu mengambil keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada dan bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang menghambat keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada. Selanjutnya adalah bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman (threats) yang ada dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) tidak menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Adapun tahapan pelaksanaan analisis SWOT adalah sebagai berikut :

- 1) Identifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman). Identifikasi dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pejabat PIP sehingga diperoleh hasil yang komprehensif dan realistis.
- 2) Kesepakatan bobot masing-masing faktor, menggunakan dua metode yakni melalui Focus Group Discussion dengan Pembina Teknis yang diselenggarakan pada Desember 2023 dan wawancara dengan Direksi.
- 3) Menentukan tingkat pengaruh dari masing-masing faktor. Tingkat pengaruh ditentukan melalui wawancara secara langsung kepada Direksi dan Kepala SPI

sebagai pihak yang berwenang untuk menjalankan kebijakan dan pengambil keputusan.

- 4) Menyusun matriks Internal Factor Analysis Summary (IFAS) dan Eksternal Factor Analysis Summary (EFAS).
- 5) Membuat kuadran posisi pengelolaan sub sektor, yaitu dengan menempatkan nilai IFAS sebagai vektor X dan nilai EFAS sebagai vektor Y sebagaimana Gambar 1.

2.2.1. Identifikasi faktor Internal dan Eksternal

Beberapa aspek yang dapat diidentifikasi sebagai kekuatan (pendorong internal), kelemahan (penghambat internal), kesempatan (pendorong eksternal), dan ancaman (penghambat eksternal) yang dibahas secara rinci dan dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut:

No.	Faktor Pendorong	I/E*)	No.	Faktor Penghambat	I/E*)
1	Terdapat banyak lembaga keuangan bukan bank yang bergerak di bidang pembiayaan ultra mikro	E	1	Dengan menjalankan pembiayaan UMi, terdapat kemungkinan penyalur mengeluarkan biaya yang lebih besar	E
2	Antusiasme yang tinggi dari linkage pada program pelatihan pendampingan, kewirausahaan, dan IT	E	2	SDM pada pihak eksternal belum sepenuhnya memiliki kompetensi yang cukup dalam pelaksanaan pembiayaan UMi	E
3	Dukungan pihak eksternal (kementerian, lembaga terkait) dalam pengembangan pembiayaan UMi	E	3	Sistem informasi dan teknologi yang terdapat pada pihak eksternal kurang mendukung secara penuh pada pelaksanaan pembiayaan UMi	E
4	Dukungan penyempurnaan SIKP yang secara kontinyu dari kementerian/lembaga terkait	E	4	Ketidaksiapan kelembagaan pelaku usaha calon penerima pembiayaan ultra mikro	E
5	Adanya kebijakan program Prioritas Nasional dalam pengalokasian dana pembiayaan untuk usaha mikro	E	5	Sebagian masyarakat atau pelaku usaha mikro masih menganggap dana bergulir Pemerintah sebagai bantuan sosial (hibah) yang tidak wajib dikembalikan	E

6	Adanya dukungan Pemerintah yang besar terhadap pembiayaan usaha mikro dan penggunaan teknologi digital	E	6	Terbatasnya Lembaga Keuangan Bukan Bank yang sejalan dengan misi Pusat Investasi Pemerintah	E
7	Meningkatnya tuntutan Publik akan pelayanan yang mudah dan cepat dalam pembiayaan usaha mikro dan penggunaan teknologi digital dalam menunjang pelayanan	E	7	Regulasi investasi pengelolaan dana bergulir yang mewajibkan Non Performing Loan sebesar nol persen	E
8	Kebutuhan dana pembiayaan ultra mikro yang cukup besar karena banyaknya pelaku usaha mikro yang belum terfasilitasi pembiayaan dari Pemerintah	E	8	Tertolaknya upload dari Debitur oleh Penyalur dikarenakan tdk sesuai dengan SIKP UMi dan Dukcapil	E
9	BLU PIP sebagai Satuan Kerja yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah	I	9	Adanya kriteria yang diatur dalam PMK yang membatasi BLU PIP dalam menunjuk penyalur.	I
10	Tersedianya perangkat hukum yang cukup dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	I	10	Belum sepenuhnya tersedia petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	I
11	Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung pelayanan fasilitas dana bergulir	I	11	Kurangnya jumlah SDM yang ahli dalam bidang pembiayaan ultra mikro	I
12	Adanya komitmen untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	I	12	Kapasitas SDM terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi belum sepenuhnya tersedia	I
13	BLU PIP memiliki tata kelola yang baik dalam menyalurkan pembiayaan ultra mikro, termasuk independensi dalam melakukan penunjukan penyalur	I	13	Belum terisinya seluruh pejabat struktural BLU PIP.	I

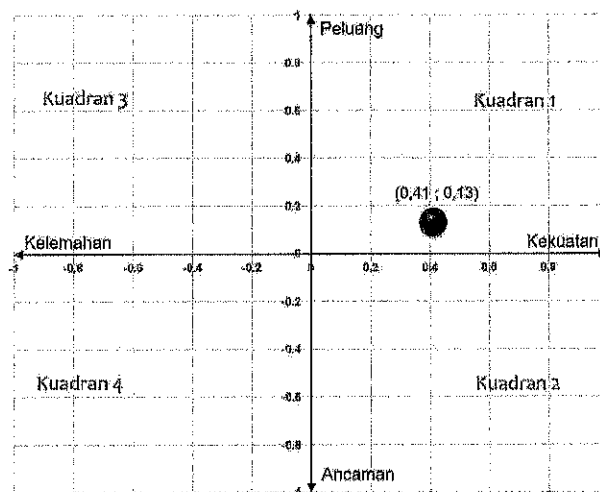
14	Adanya komitmen pegawai yang tinggi dalam mencapai target yang telah ditetapkan	I	14	SIKP UMi masih perlu dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan	I
15	Penyalur menjaminkan jaminan fidusia yang berupa piutang lancar	I	15	Pelayanan pembiayaan ultra mikro belum sepenuhnya menggunakan teknologi informasi	I
16	Adanya SIKP UMi yang mendukung pelaksanaan tusi serta database Penerima UMi yang terintegrasi dengan Penerima KUR	I	16	Belum adanya strategi untuk mendapatkan sumber pendanaan di luar APBN	I
17	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	I			

* Keterangan: I = Internal, E = Eksternal

Tabel 1 Identifikasi Faktor Pendorong dan Penghambat

2.2.2. Penyusunan Kuadran Hasil Posisi SWOT

Dari hasil perhitungan matriks IFAS dan EFAS, diperoleh hasil Selisih Kekuatan dan Kelemahan sebesar 0,41 dan Selisih Peluang dan Ancaman sebesar 0,13. Hal ini apabila digambarkan dalam kuadran SWOT akan masuk dalam Kuadran I sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1 Kuadran SWOT

Berdasarkan hasil analisis SWOT, posisi BLU PIP akan masuk ke dalam kuadran I sehingga strategi yang direkomendasikan adalah strategi kekuatan dan peluang yaitu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

2.3. Inisiatif Strategis

Atas dasar analisa yang diuraikan pada poin-poin sebelumnya, BLU PIP menyusun 9 (sembilan) blok dasar BMC (*Business Model Canvas*), antara lain:

- 1) *Customer Segments;*
- 2) *Value Propositions;*
- 3) *Channels;*
- 4) *Customer Relationship;*
- 5) *Revenue Streams;*
- 6) *Key Resources;*
- 7) *Key Activities;*
- 8) *Key Partnerships; dan*
- 9) *Cost Structure.*

Key Partner • Kemenkeu • Kemenkop • Kemendagri • Kemen PPPA • Kemensos • Kemendes • OJK • Pemda • Konsultan • Notaris • Jamkrida • Donor	Key Activities • Kerjasama Program • Pengelolaan dana yang prudent dan profesional • Sistem Keuangan dan Monitoring & Evaluasi • Pengelolaan Account & Community Management • Model Penjaminan • Penerapan “KYC”	Value Proposition • Low Cost of fund • Cepat, mudah, prudent, profesional • Empowering kepada Penyalur Kecil • Business Sustainability • Economy booster/fiscal tools	Customer Relationship • Call centre • Technical Support • Tim marketing • Kanwil DIPb dan KPPN • Pemda • Komunitas • Media Sosial dan Website	Customer Segments • Pelaku UMKM • Usaha Produktif & Start-Up Tech • Penyalur
Key Resources • Dana kelolaan yang meningkat • SDM yang profesional • Tata Kelola yang terjaga (SOP) • SIT yang handal dan terintegrasi • Hubungan kelembagaan yang baik			Channels • LKBB/Penyalur/Linkage • Start-Up Tech • Special Business Unit	
Cost Structure		Revenue Stream		

• Biaya operasional : SDM, Pengadaan, TI, Money, Fee • Biaya non operasional : biaya administrasi, sewa gedung, pelatihan, sosialisasi	• Pendapatan Pembiayaan (Koperasi, LKM, Pelaku UMKM, VC, Start-UP, PT) • Pendapatan Investasi (VC, PT, Start-UP) • Hibah (Pemda, PT, Donor, Komunitas)
---	--

Business Model Canvas BLU PIP

Tabel 2 Model Bisnis BLU PIP

BAB III RENCANA STRATEGIS BISNIS

3.1. Kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. RPJMN Tahun 2025-2029 mengelaborasi substansi dari pendekatan perencanaan teknokratik dan politis. Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan memadupadankan Visi Misi Presiden dan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045. Delapan Prioritas Pembangunan nasional diarahkan secara konkret untuk mencapai sasaran Pembangunan.

Kesatuan arah Pembangunan menjadi salah satu kunci keberhasilan Pembangunan nasional. Untuk itu RPJMN Tahun 2025-2029 juga menjadi dasar hukum penyusunan rencana kerja di Kementerian/Lembaga. Di samping itu rencana pembangunan daerah juga harus diselaraskan dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Selain sinkronisasi di bidang perencanaan, sinergi antara perencanaan dan penganggaran juga merupakan bagian yang penting di dalam menjamin pelaksanaan prioritas pembangunan.

Prioritas Pembangunan dituangkan dalam strategi pembangunan kewilayahan dengan konsep tematik, holistik, integratif dan spasial. Strategi kewilayahan tidak hanya mencakup strategi pembangunan kawasan timur-barat Indonesia, perdesaan-perkotaan namun mencakup pula rencana intervensi pembangunan di tiap provinsi di seluruh Indonesia. Highlight intervensi kebijakan wilayah dan provinsi ini disusun menjadi acuan yang jelas bagi pelaku pembangunan di pusat dan daerah.

3.2. Strategi Bisnis BLU

Berdasarkan analisis SWOT dan model bisnis BLU PIP, strategi pertumbuhan yang akan dilakukan BLU PIP pada tahun 2025 s.d. 2029 adalah perluasan pembiayaan dan penguatan pemberdayaan. Strategi tersebut bertujuan untuk menjangkau pelaku UMKM yang belum terfasilitasi pembiayaan formal dan meningkatkan dampak pembiayaan melalui program pemberdayaan yang terstruktur dan berkelanjutan.

BLU PIP telah memetakan beberapa program yang mendukung implementasi strategi diatas, sebagai berikut:

- 1) Program perluasan jangkauan dan peningkatan kinerja penyaluran pembiayaan melalui penambahan produk dan kenaikan plafon;
- 2) Program perluasan segmen sasaran pembiayaan ;
- 3) Program perluasan kanal / skema penyaluran pembiayaan;
- 4) Program penguatan kelembagaan dan SDM Penyalur;

- 5) Program penguatan tata kelola dan mitigasi risiko pembiayaan;
- 6) Pengembangan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP-UMi)
- 7) Program penguatan pemberdayaan melalui peningkatan kualitas pendampingan, inkubasi usaha dan kurasi produk.

Oleh karena itu, strategi pertumbuhan yang dilakukan atas penyaluran pembiayaan UMi diuraikan pada poin-poin di bawah ini:

- 1) Membangun dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh stakeholder: K/L, Pemda, BUMN/BUMD, BUMDes, dll, termasuk dengan AFPI untuk berbagi pakai data pembiayaan untuk memperkuat database credit scoring, kerjasama BPS untuk pensasaran target melalui survey sehingga coverage debitur dalam kemampuan menjangkau UMKM meningkat dari 7,68 juta orang menjadi 16,2 juta orang penerima.
- 2) Meningkatkan jangkauan penyaluran pembiayaan ultra mikro dengan cara menambah jumlah Penyalur sekaligus meningkatkan peran pemerintah daerah khususnya melalui Kerjasama program identifikasi dan pembinaan LKBB potensial.
- 3) Mendukung penguatan kelembagaan lembaga keuangan bukan bank sebagai penyalur pembiayaan ultra mikro melalui pelatihan manajerial dan account officer.
- 4) Mengidentifikasi dan menggandeng mitra penyalur pembiayaan dan pemberdayaan: *Close Loop Ecosystem*, Perguruan Tinggi, Mahasiswa, Siswa SMU, dan jaringan entitas yang potensial.
- 5) Mengembangkan New Generation Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) UMi yang terintegrasi.
- 6) Memberdayakan debitur dan calon debitur melalui berbagai pelatihan kewirausahaan.
- 7) Menambah Dana Kelolaan dari semula Rp. 10 T menjadi Rp. 13,7 T baik dari yang berasal APBN maupun di luar APBN
- 8) Memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi guna memastikan ketepatan sasaran pembiayaan ultra mikro.
- 9) Memperkuat kapasitas kelembagaan PIP: organisasi, kerangka regulasi-proses bisnis-mitigasi risiko, SDM, IT dan Sarana Prasarana.

3.3. Kegiatan dan Indikator

Program: Menyediakan layanan pembiayaan yang mudah dan terjangkau dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab

No	Sasaran Strategi Bisnis	Tahun Ke-				
		1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Peningkatan jangkauan dan ketersediaan pembiayaan melalui perluasan kanal penyaluran	Target pelaku usaha penerima: • 1.470.000 orang	Target pelaku usaha penerima: • 1.480.000 orang	Target pelaku usaha penerima: • 1.580.000 orang	Target pelaku usaha penerima: • 1.670.000	Target pelaku usaha penerima: • 1.770.000
2	Pengendalian pembiayaan bermasalah	Target pembiayaan bermasalah- NPL • 2%	Target pembiayaan bermasalah- NPL • 2%	Target pembiayaan bermasalah- NPL • 2%	Target pembiayaan bermasalah- NPL • 2%	Target pembiayaan bermasalah- NPL • 2%

Program: Mengoptimalkan pengelolaan dana pembiayaan UMKM yang prudent, efisien dan efektif

No	Sasaran Strategi Bisnis	Tahun Ke-				
		1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Peningkatan efektivitas penggunaan dana.	Target nilai penyaluran pembiayaan UMKM ke debitur: • Rp10.930 Miliar	Target nilai penyaluran pembiayaan UMKM ke debitur: • Rp11.020 Miliar	Target nilai penyaluran pembiayaan UMKM ke debitur: • Rp11.680 Miliar	Target nilai penyaluran pembiayaan UMKM ke debitur: • Rp12.380 Miliar	Target nilai penyaluran pembiayaan UMKM ke debitur: Rp13.120 Miliar

2	Peningkatan kualitas jaminan pembiayaan	Target persentase coverage jaminan pembiayaan • 100%	Target persentase coverage jaminan pembiayaan • 100%	Target persentase coverage jaminan pembiayaan • 100%	Target persentase coverage jaminan pembiayaan • 100%
---	---	---	---	---	---

Program: Mengembangkan sistem informasi dan teknologi informasi pendukung pembiayaan yang andal dan modern

No	Sasaran Strategi Bisnis	Tahun Ke-				
		1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Peningkatan kapabilitas layanan aplikasi PIP	5 modul aplikasi	5 modul aplikasi	5 modul aplikasi	5 modul aplikasi	5 modul aplikasi
2	Penguatan ketersediaan layanan aplikasi dan keamanan informasi	Ketersediaan aplikasi (uptime) 98%	Ketersediaan aplikasi (uptime) 99%	Ketersediaan aplikasi (uptime) 99%	Ketersediaan aplikasi (uptime) 99,5%	Ketersediaan aplikasi (uptime) 99,5%

Program: Melakukan pemberdayaan yang terstruktur dan berkelanjutan kepada pelaku UMKM

No	Sasaran Strategi Bisnis	Tahun Ke-				
		1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Pemberdayaan pelaku UMKM	Jumlah pelaku usaha yang menerima pemberdayaan (di leverage): • 2.000 orang	Jumlah pelaku usaha yang menerima pemberdayaan (di leverage): • 3.000 orang	Jumlah pelaku usaha yang menerima pemberdayaan (di leverage): • 4.500 orang	Jumlah pelaku usaha yang menerima pemberdayaan (di leverage): • 6.800 orang	Jumlah pelaku usaha yang menerima pemberdayaan (di leverage): • 10.100 orang

2	Penguatan pendampingan oleh penyalur	Target Pelatihan account officer • 300 orang	Target Pelatihan account officer • 360 orang	Target Pelatihan account officer • 440 orang	Target Pelatihan account officer • 540 orang	Target Pelatihan account officer • 660 orang
3	Penguatan kapasitas SDM penyalur	Target SDM penyalur yang diberikan pelatihan oleh PIP • 150 orang	Target SDM penyalur yang diberikan pelatihan oleh PIP 175 orang	Target SDM penyalur yang diberikan pelatihan oleh PIP 200 orang	Target SDM penyalur yang diberikan pelatihan oleh PIP 225 orang	Target SDM penyalur yang diberikan pelatihan oleh PIP 250 orang

Program: Mengembangkan kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder untuk memperkuat ekosistem UMKM

No	Sasaran Strategi Bisnis	Tahun Ke-				
		1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Perluasan kerjasama dengan Instansi / Lembaga	Target penambahan Kerjasama (dalam unit) • 15	Target penambahan Kerjasama (dalam unit) • 15	Target penambahan Kerjasama (dalam unit) • 15	Target penambahan Kerjasama (dalam unit) • 15	Target penambahan Kerjasama (dalam unit) • 15
2	Sinergi Pembiayaan UMKM dalam rangka integrasi antar program	Jumlah Lembaga yang terintegrasi dalam rangka integrasi antar program (<i>fiscal tools</i>) dan berbagi data penyaluran pembiayaan dari	Jumlah Lembaga yang terintegrasi dalam rangka integrasi antar program (<i>fiscal tools</i>) dan berbagi data penyaluran pembiayaan dari	Jumlah Lembaga yang terintegrasi dalam rangka integrasi antar program (<i>fiscal tools</i>) dan berbagi data penyaluran pembiayaan dari	Jumlah Lembaga yang terintegrasi dalam rangka integrasi antar program (<i>fiscal tools</i>) dan berbagi data penyaluran pembiayaan dari	Jumlah Lembaga yang terintegrasi dalam rangka integrasi antar program (<i>fiscal tools</i>) dan berbagi data penyaluran pembiayaan dari

	lembaga entitas penyalur pembiayaan UMKM di luar SLIK OJK • 5 lembaga	lembaga entitas penyalur pembiayaan UMKM di luar SLIK OJK • 5 lembaga	lembaga entitas penyalur pembiayaan UMKM di luar SLIK OJK • 5 lembaga	lembaga entitas penyalur pembiayaan UMKM di luar SLIK OJK • 5 lembaga	lembaga entitas penyalur pembiayaan UMKM di luar SLIK OJK • 5 lembaga
--	--	--	--	--	--

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kontribusi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional sangatlah besar. Namun demikian, masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Salah satu permasalahan krusial yang dihadapi adalah sulitnya untuk mendapatkan akses permodalan. Pemerintah sebenarnya memiliki banyak program fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk membantu pelaku UMKM memperoleh akses pendanaan misalnya saja Kredit Usaha Rakyat (KUR). Akan tetapi, karena teknis penyaluran yang melibatkan perbankan, sehingga banyak pelaku UMKM yang masih sangat sulit untuk dapat mengakses fasilitas tersebut. Hal ini disebabkan para pelaku UMKM tersebut terutama bagi yang berkategori mikro tidak memiliki *collateral* yang dapat dijadikan agunan, dimana salah satu syarat untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan tersebut adalah adanya *collateral*.

Mencermati dinamika tersebut, di tahun 2017 Pemerintah kembali meluncurkan program pembiayaan mudah dan terjangkau yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro sebagai komplementer dari program KUR. Untuk melaksanakan program ini, pemerintah memerlukan unit kerja di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan dana. Oleh karena itu, Menteri Keuangan menetapkan BLU PIP sebagai operator pelaksana pembiayaan UMi. Dengan kewenangan fleksibilitas pengelolaan dana yang dimiliki, diharapkan dapat me-leverage dana yang dikelola agar dapat mencapai sasaran dan tujuan program pembiayaan UMi.

Namun demikian, penunjukan BLU PIP sebagai operator investasi pemerintah dalam bidang pembiayaan UMi, membawa konsekuensi terhadap perubahan organisasi dan tata kelola BLU PIP. Salah satu dampak dari perubahan organisasi dan tata kelola BLU PIP adalah perubahan dokumen Rencana Strategis Bisnis yang merupakan dokumen perencanaan bisnis berisi visi, misi, tujuan, program strategis, kegiatan, pengukuran capaian dan target kinerja BLU PIP selama 5 tahun ke depan.

Sebagai satuan kerja BLU PIP menetapkan visi pada Rencana Strategis Bisnis pada tahun 2025-2029 “Menjadi Pengelola Pembiayaan UMKM yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BLU PIP menyusun dokumen Rencana Strategis Bisnis bertujuan untuk memberikan petunjuk dan gambaran dari suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan.

Selama kurun waktu tersebut, BLU PIP menitikberatkan pada jumlah dana kelolaan yang disalurkan kepada pelaku UMKM sampai dengan 13,1 Triliun serta dampak jumlah pelaku usaha yang menerima pemberdayaan sebanyak 10.100 orang. Hal ini berbeda

dengan Rencana Strategis Bisnis BLU PIP pada 5 (lima) tahun sebelumnya yang menitikberatkan pada Jumlah Debitur yang mendapat pembiayaan UMI dari BLU PIP.

Mengingat Visi dan Misi BLU PIP mengalami perubahan sehingga terhadap layanan BLU PIP terdapat penambahan layanan jumlah pelaku usaha UMKM sebagai penerima Pembiayaan UMI - Pro dengan plafon sampai dengan Rp. 100 Juta per debitur, dan Pembiayaan UMI – Pro dari dana hibah untuk melengkapi produk Pembiayaan UMI dengan plafon sampai dengan Rp.20 Juta.

BLU PIP juga akan membangun dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh stakeholder baik K/L, Pemda, BUMN/BUMD, BUMDes, termasuk AFPI untuk berbagi pakai data pembiayaan untuk memperkuat database scoring. Kedepan BLU PIP juga akan memperkuat kapasitas kelembagaan PIP baik secara organisasi, kerangka regulasi, proses bisnis, mitigasi risiko, SDM, IT dan Sarana Prasarana.

Dari aspek kinerja organisasi, BLU PIP menyusun rencana kerja yang diukur menggunakan metode balance scorecard yang diidentifikasi dalam empat perspektif yaitu, stakeholder perspective, customers perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective. Pengukuran kinerja ini akan dituangkan dalam bentuk kontrak kinerja manajemen yang berisi target-target kinerja tahunan yang mesti dicapai. Sebagai operator pembiayaan, BLU PIP beroperasi dalam kegiatan usaha yang mengandung risiko. Seiring dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi dan meningkatnya kebutuhan praktik tata kelola yang baik, dan dalam rangka memastikan kegiatan usaha yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian atau hal-hal yang dapat mengganggu kelangsungan BLU PIP, maka BLU PIP menerapkan manajemen risiko.

4.2 Hal-Hal Penting

Dari rencana strategis yang telah disusun tersebut, kunci utama untuk dapat mewujudkan hal tersebut adalah adanya tekad dan semangat yang besar serta dukungan dari berbagai pihak. Selain itu, perangkat hukum yang memadai dan efektif harus dapat memberikan guidance bagi BLU PIP dalam melaksanakan setiap mandat yang diberikan. Dalam implementasinya keselarasan antara visi, misi, strategi dan kebijakan serta program kerja harus dijaga.